



---

## **Paradigma Pendidikan Vokasi: Tantangan, Harapan Dan Kenyataan**

---

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Wargijono Utomo Universitas Negeri Malang <a href="mailto:uwargiono@gmail.com">uwargiono@gmail.com</a> +6281310002187	ISSN: 2798-0448 Vol. 1, No. 2 , Desember 2021 <a href="http://almufi.com/index.php/AJMAEE">http://almufi.com/index.php/AJMAEE</a>

© 2021 Almufi All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Utomo,W. (2021). Paradigma Pendidikan Vokasi : Tantangan, Harapan Dan Kenyataan. *Almufi Journal of Measurement, Assessment, and Evaluation Education*, 1 (2), 65-72

### **Abstrak**

Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan bahwa sampai saat ini mutu lulusan belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja. Salah satu pendidikan yang seharusnya menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi keahlian profesional adalah pendidikan kejuruan, namun sepertinya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pendidikan vokasi yang selama ini diharapkan oleh Pemerintah serta masyarakat agar dapat memberikan suatu keterampilan bagi peserta didiknya sehingga dapat dengan mudah diterima di dunia kerja pada saat lulus, namun ternyata masih belum sesuai yang diharapkan. Penulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan pengangguran pendidikan vokasi, tantangan, harapan dan solusi. Dalam penulisan artikel, penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai pustaka, membaca, mencatat serta mengolah dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan vokasi di Indonesia. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia masih belum dapat memenuhi harapan sehingga masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan secara struktural dan sistematis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata Kunci:** Pendidikan Vokasi, Tantangan, Harapan dan Kenyataan

### **Abstract**

The high unemployment rate reflects that until now the quality of graduates has not been able to meet the demands of the world of work. One of the educations that should create graduates who have professional competence is vocational education, but it seems that this goal has not been fully achieved. Vocational education which has been expected by the Government and the community to provide skills for students so that they can be easily accepted into the world of work upon graduation, however, is still not as expected. This writing aims to analyze the problems of vocational education unemployment, challenges, hopes and solutions. In writing the article, the author uses a qualitative method by collecting data from various libraries, reading, recording and processing from various library sources related to the problems of vocational education in Indonesia. From the results of the analysis, it can be concluded that vocational education in Indonesia has not been able to meet expectations so that structural and systematic improvements still need to be made to overcome these problems.

**Key Words:** Vocational Education, Challenges Hopes, And Realities

## A. Pendahuluan

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan bahwa sampai saat ini mutu lulusan belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja. Salah satu pendidikan yang seharusnya menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi keahlian profesional adalah pendidikan kejuruan, namun seperti tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pendidikan vokasi yang selama ini diharapkan oleh Pemerintah serta masyarakat agar dapat memberikan suatu keterampilan bagi peserta didiknya sehingga dapat dengan mudah diterima di dunia kerja pada saat lulus, namun ternyata masih belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak lulusan sekolah vokasi seperti Sekolah Menengah Kejuruan ketika lulus mereka masih menganggur, padahal selama di sekolah mereka dibekali kemampuan untuk bekerja, hal ini menjadi dilema dalam pendidikan vokasi.

Dari sisi penyerapan lapangan kerja, berdasarkan data Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK paling tinggi dibanding dengan tingkat pendidikan lain, yaitu 13,35 persen, meningkat dibanding dengan Agustus 2019 (10,36 %). Sumber data CNBC Indonesia yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang diantaranya pendidikan vokasi 6,16% dan SMK 11,45% terbesar secara nasional. Selain itu, beberapa permasalahan maupun kendala yang dihadapi pendidikan vokasi yaitu terbatasnya keterlibatan DUDI, Tingkat pengangguran pendidikan vokasi tinggi, kompetensi SDM, kualitas lulusan, pengembangan bidang keahlian, Porsi SMK dalam penerimaan mahasiswa nasional, dan Kebijakan "pukul rata" antara universitas dengan politeknik perlu ditinjau ulang (Renstra vokasi 2020-2024). Berdasarkan data-data tersebut sekolah vokasi di Indonesia belum sesuai dengan harapan yang dikehendaki oleh pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri, hal ini merupakan suatu tantangan bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Untuk itu, para pemangku kepentingan (stakeholder) kiranya dapat melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi secara sinergis, terstruktur, dan sistematis agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga lulusan pendidikan vokasi dapat terserap ke dunia usaha dan dunia industri.

## B. Metodologi

Dalam artikel penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelusuri, menelaah, dan mengumpulkan dari berbagai buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan paradigma pendidikan vokasi. Adapun dalam metode pengumpulan data dengan mencari sumber-sumber permasalahan sekolah vokasi secara fundamental serta perspektif pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri serta hubungannya dengan teori-teori yang digunakan dalam solusi pemecahan masalah tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

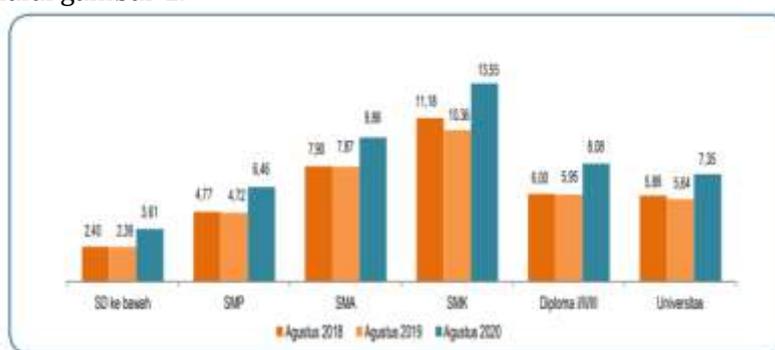
### 1. Hasil

Pendidikan vokasi adalah bagian penting dalam sistem pendidikan nasional serta mempunyai posisi yang strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia maupun tenaga kerja yang berkualitas serta terlibat aktif dalam dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan vokasi seharusnya dapat memberikan suatu kesadaran kepada para pelaku DUDI turut serta secara aktif tanggung jawab besar mengembangkan sumber daya manusia agar dapat mengisi lapangan pekerjaan dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi. Dalam kajian paradigma yang lama pendidikan vokasi menempatkan industri hanya pengguna akhir dari suatu lulusan sekolah vokasi sehingga harus di rubah dalam paradigma tersebut. Saat ini dunia industri dapat berperan dalam penyelarasan kurikulum, pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui suatu proses pendidikan yang produktif, implementasi pembelajaran berstandar industri, penguatan life skill di industri serta interpreneurship di sekolah-sekolah. Pemagangan kerja, penguatan kompetensi dan lembaga, serta pelaksanaan sertifikasi dan penyerapan lulusan.

Melalui kebijakan pemerintah tentang revitalisasi pendidikan vokasi telah berubah yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yaitu seorang peserta didik baik di SMK/Kursus/

Pelatihan/Perguruan Tinggi Vokasi mengikuti proses pembelajaran (pola pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi SDM (Guru/Instruktur/Dosen) harus mengikuti kebutuhan dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Sehingga karena kompetensinya telah mendapatkan sertifikat/pengakuan dari mitra industrinya, maka peserta didik maupun guru/instruktur/dosen dapat melakukan pemagangan serta untuk lulusannya dapat bekerja langsung diterima di industri tersebut.

Namun dalam kenyataannya, setelah berjalannya kebijakan pemerintah kurang lebih empat tahun berjalan tentang revitalisasi pendidikan vokasi menjadi bertolak belakang antara harapan dan kenyataan dari para pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha serta dunia industri. Hal ini dapat di buktikan berdasarkan laporan biro pusat statistik pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masing-masing kategori pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya TPT nasional. TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 3,61 persen. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 1.



Gambar 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2018–Agustus 2020

Sedangkan penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan tertinggi Pada Agustus 2020, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 38,89 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,33 persen. Hal ini dapat di lihat pada gambar 2.



Gambar 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2018–Agustus 2020

Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (0,94 persen poin), SMK (0,12 persen poin), dan Universitas (0,06 persen poin). Sementara penduduk bekerja dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 0,69 persen poin. Permasalahan atau kendala yang dihadapi revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia, berdasarkan RENSTRA DIRJEN VOKASI 2020-2024 diantaranya:

Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi (*Real Link and Match DUDI*); Tingkat pengangguran lulusan dari pendidikan vokasi masih tinggi; Kompetensi SDM (Dosen/Guru/Instruktur) belum sesuai kebutuhan baik secara internal dalam pendidikan vokasi maupun untuk kebutuhan industri; Kualitas lulusan dari pendidikan vokasi masih belum memadai sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah; Pengembangan bidang keahlian pada lembaga kursus dan pelatihan belum sejalan dengan kebutuhan industri serta belum merespon kebutuhan pasar.

Berdasarkan laporan PANJA DPR RI tahun 2019-2020, Permasalahan lain penyelenggaraan

pendidikan kejuruan di Indonesia.

Belum ada kesepahaman antara pihak SMK dengan DUDI; Kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha lebih tinggi daripada yang mampu disediakan oleh SMK; Keterbatasan guru kejuruan, sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan tuntutan industri; Jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK saat ini belum sesuai; Informasi yang kurang jelas karena nama SMK tidak dibarengi dengan jurusan konsentrasi jurusan sehingga menimbulkan kebingungan.

Berdasarkan laporan PANJA DPR RI tahun 2019-2020 Permasalahan lain penyelenggaraan pendidikan Vokasi di Indonesia.

Lemahnya komitmen bersama secara aktif dalam mendukung pelaksanaan dan penguatan pendidikan vokasi; Kurikulum pendidikan belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan DUDI; Pendidikan vokasi belum menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dan masyarakat secara umum; Alokasi anggaran pendidikan vokasi masih belum mencukupi; SDM tenaga politeknik umumnya berlatar belakang pendidikan akademis; Minat masyarakat umum masih fokus terhadap pendidikan jangka pendek; Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam alokasi dana beasiswa; Terbatasnya dosen vokasi yang memiliki gelar S2 itu sangat susah.

Mengatasi ketidaksesuaian, khususnya, kekurangan keterampilan sangat penting, karena ketidaksesuaian berdampak negatif pada output, produktivitas, daya saing, dan inovasi suatu bangsa. Berdasarkan data *Indonesia's Occupational Employment Outlook 2020 Technical Report*, berikut ini penyebab ketidaksesuaian keterampilan yang paling umum di Indonesia diantaranya; Informasi pasar tenaga kerja yang tidak memadai; Rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan; Kesempatan terbatas untuk pelatihan di tempat kerja; Biaya mobilitas tenaga kerja yang tinggi; Perubahan struktural dan perkembangan teknologi yang pesat.

## 2. Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian dan temuan dari berbagai literatur pada dasarnya permasalahan-permasalahan tersebut ada kesamaan, namun demikian pembahasan dalam penelitian akan dibahas dalam skala prioritas, selanjutnya dapat di buat analisa sebagai berikut :

### *Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri;*

Sehingga dapat menghambat program magang peserta didik dan mahasiswa untuk dapat menguasai berbagai keterampilan hal ini juga akan menghambat kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berdampak pada perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan Survei Bank Dunia 2016 tentang Persepsi Pasar Tenaga Kerja, hanya sepertiga perusahaan menengah yang memberikan pelatihan kepada pekerja. Selain itu, dari perusahaan besar yang diwajibkan oleh peraturan ketenagakerjaan Indonesia untuk memberikan pelatihan pekerja, sepertiganya gagal untuk mematuhi. Dengan demikian sudah jelas, agar *Link and Match* berjalan dengan baik perlu adanya payung hukum yang kuat serta memberikan reward kepada perusahaan yang bersedia memberikan pelatihan kepada peserta didik dan mahasiswa dari sekolah vokasi. Pada pelaksanaannya payung hukum yang sudah disepakati tidak dipatuhi bersama, bahkan dalam implementasinya tahun 2016 Kementerian Perindustrian berkomitmen membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini sekaligus untuk mendorong pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan. Wujud komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan bersama Nota Kesepahaman (MoU) lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri. Kelima Menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno. Penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

### *Kualifikasi kompetensi lulusan pendidikan Vokasi masih rendah;*

Hanya 65 persen pekerja Indonesia yang menyelesaikan sekolah menengah atas, menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Namun, Indonesia masih menderita kualitas sekolah yang buruk. Berdasarkan skor dari Program untuk Penilaian Pelajar Internasional (PISA) dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), lebih dari separuh siswa Indonesia tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Hasil lulusan vokasi pada kenyataannya belum mampu diserap dunia

usaha dan dunia industri. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yakni kurikulum pendidikan vokasi belum sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, kemampuan guru/dosen/instruktur masih sebatas pada teori, perlengkapan yang digunakan belum dapat menunjang kegiatan pelatihan, manajemen Lembaga pelatihan, dan pelatihan belum berbasis inovasi dan teknologi (Afrina dkk, 2018). Berdasarkan data dari Renstra Dirjen Vokasi 2020-2024 SMK di Indonesia memiliki 146 kompetensi dimana dari 146 kompetensi tersebut, sekitar 60% dari proporsi kompetensi diisi hanya oleh 10 kompetensi utama SMK di Indonesia memiliki 146 kompetensi dimana dari 146 kompetensi tersebut, sekitar 60% dari proporsi kompetensi diisi hanya oleh 10 kompetensi utama, diantaranya; teknik komputer dan jaringan sebesar 12,83% atau 1.711 SMK, akuntansi sebanyak 8,06% atau 1.075 SMK, administrasi perkantoran sebesar 7,22% atau 963 SMK, teknik kendaraan ringan sebanyak 6,95% atau sebanyak 927 SMK, teknik kendaraan motor 5,1% atau sebanyak 681 SMK, teknik permesinan 4,71% atau sebanyak 629 SMK, pemeliharaan dan perbaikan motor dan rangka pesawat udara sebesar 4,7% atau sebanyak 628 SMK, multimedia sebesar 4,48% atau sebanyak 597 SMK, pemasaran sebesar 3,01% atau sebanyak 401 SMK, teknik pendingin dan tata udara sebesar 2,62% atau sebanyak 350 SMK. Selain itu masih belum menyentuh di sektor kompetensi bidang pertanian, kehutanan dan perikanan hal ini sesuai dengan data BPS pada lapangan pekerjaan utama pada sepuluh tahun terakhir dari februari 2011 sampai dengan februari 2021 masih menyumbang lapangan kerja yang tertinggi diantara sektor pekerjaan yang lainnya. Permasalahan klasik yaitu Kurikulum Pendidikan masih lebih banyak teori dan tidak jauh berbeda dengan SMA umum, dan hanya 58 persen untuk bobot mata pelajaran kejuruan.

Begitupun program politeknik menghadapi beberapa tantangan, antara lain akreditasi politeknik masih di bawah standar di mana sebanyak 59 persen program studi politeknik masih terakreditasi di bawah B. Kurikulum politeknik belum bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan industri dan kurangnya dosen industri bagi Pendidikan politeknik (Afrina, 2018. Panja DPR RI 2019-2020.

Saat ini Perguruan Tinggi Vokasi atau biasa disebut dengan Politeknik dan Akademik Komunitas yang lulusannya merupakan lulusan D3 (vokasi) masih kurang diminati, banyak lulusan dari SMA maupun SMK yang sebenarnya tidak diterima di SNMPTN, kemudian masuk ke Politeknik/Akademi Komunitas dan merasa terpaksa karena tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini juga akhirnya berakibat pada lulusan D3 vokasi hanya ditempatkan sebagai operator/teknisi di dalam sistem dunia industri. Selain hal tersebut, peserta didik pendidikan tinggi vokasi (politeknik) umumnya berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat ekonomi yang tidak tinggi. Hal itu terkait dengan motif kuliah di politeknik/Akademi Komunitas karena harapan agar cepat mendapat pekerjaan dengan waktu studi yang relatif cepat yaitu 1, 2, atau 3 tahun (Renstra Dirjen Vokasi 2020-2024).

Sementara itu program vokasi lainnya seperti BLK masih sangat minim dalam peranannya terhadap tenaga kerja yang terampil. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya : Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja sebanyak 290.783 orang; Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan Pendidikan Kewirausahaan/ berwirausaha sebanyak 201.599 orang; Jumlah peserta didik Kursus dan Pelatihan yang mengikuti magang pada DUDI sebanyak 5.030 orang; Jumlah master pengujian untuk Kursus dan Pelatihan sebanyak 666 orang. Persoalan yang dihadapi antara lain rendahnya minat angkatan kerja muda untuk mengikuti pelatihan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh promosi yang dilakukan oleh BLK sangat jarang sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan BLK. Masalah lainnya adalah sejumlah BLK dalam kondisi yang tidak memadai, mulai dari kondisi gedung, sarana-prasarana hingga materi yang diajarkan tidak bersaing. Hal ini diperkuat berdasarkan data World Bank (2011), sebesar 53,85 persen BLK di Indonesia tidak memiliki peralatan. Dari berbagai tantangan dalam pendidikan vokasi inilah yang menyebabkan kompetensi keahlian dari para lulusan Pendidikan vokasional di Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dari industri dan cenderung tidak siap dalam memenuhi tuntutan industri. Oleh karena itu , perlu dilakukan reformasi di sektor pendidikan, baik formal maupun informal, serta dilakukan budaya melayani dari pemangku kepentingan.

#### *Kompetensi SDM (Dosen/Guru/Instruktur) belum sesuai kebutuhan industri;*

Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang peranannya sangat penting. Guru dapat dikatakan sebagai penggerak proses pembelajaran khususnya yang terjadi di ruang lingkup sekolah. Bertolak dari hal tersebut, guru dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pendidikan, karena guru dianggap sangat berperan dalam menentukan mutu pendidikan. Bidang pekerjaan guru terbagi ke dalam empat hal yaitu; pendidikan, proses

belajar-mengajar atau bimbingan dan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan. Mengacu pada hal tersebut, peningkatan pendidikan dan profesionalisme guru menjadi hal yang signifikan karena guru bukan hanya semata pekerjaan, tetapi juga profesi yang menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan. Undang-undang no 14 tahun 2005 menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan[4]. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. 4 kompetensi tersebut merupakan sebuah tuntutan untuk dikuasai semaksimal mungkin oleh guru sehingga dapat mencapai tingkat guru yang profesional dan memperbaiki kualitas guru yang disebut sebagai salah satu aspek penting dalam pendidikan

Berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang dan kualitas guru menempati ukuran ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia, Pak/Bu. Jumlah guru mengalami peningkatan sebanyak 382% dari 1999/2000 menjadi sebanyak 3 juta orang lebih, sedangkan peningkatan jumlah peserta didik hanya 17%. Dari 3.9 juta guru yang ada, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% di antaranya belum memiliki sertifikat profesi. Dengan jumlah guru yang banyak, diharapkan kegiatan belajar yang optimal dapat tercapai. Sayangnya, meningkatnya kuantitas guru tidak sejalan dengan kualitasnya (ruang guru.com).

Berikut ini, beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen serta memperbaiki kompetensinya; Menyelenggarakan Program Pengembangan Profesionalisme Guru yang Efektif, Melibatkan Guru dalam Program Pengembangan Profesionalisme, Peningkatan Kompetensi melalui Program Sertifikasi Guru dan dosen, Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pelatihan Penggunaan Teknologi Digital, Mendorong Guru dan Dosen untuk Aktif dalam Kegiatan Ilmiah, dan Pelatihan untuk Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Inggris.

### *Mempersiapkan Tenaga Kerja Secara Sistematis dan Struktural*

#### *1. Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia*

Vokasi diartikan sebagai pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian di Indonesia. Guna menciptakan tenaga kerja yang memiliki penguasaan pada kualifikasi atau keahlian tersebut, maka pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan melalui 3 lembaga utama, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK). Pendidikan dan pelatihan vokasi dibentuk dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap masuk ke dunia kerja sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Program Pengembangan Vokasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, terwujudnya *link and match* antara lulusan vokasi dengan kebutuhan DUDI, dan menciptakan Lembaga Pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih berkualitas. Program Pengembangan Vokasi ini secara umum muncul karena beberapa permasalahan yang melatarbelakanginya diantaranya: Pengangguran mencapai 6,8 juta jiwa, 25% di antaranya berasal dari lulusan vokasi (BPS, 2018); *Mismatch* lulusan vokasi dengan DUDI sebesar 50% (BPS,2018); arahan presiden ratas 21 november 2018 menko perkonomian ditugaskan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan vokasi di indonesia;

Sejalan dengan permasalahan tersebut, pemerintah berargumen bahwa permasalahan vokasi ada pada kualitas bukan pada kuantitasnya. Di samping itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung melakukan perekrutan lulusan vokasional hanya untuk menempati posisi low level saja. Untuk itu, arah kebijakan pengembangan vokasi di masa depan berada pada peningkatan kualitas lulusan terutama agar tetap relevan dengan dinamika perubahan tren otomatisasi. Peningkatan kualitas lulusan akan dilakukan melalui perbaikan struktural pendidikan vokasional. Sejalan dengan hal itu, pemerintah perlu melakukan diversifikasi bidang kerja yang merupakan aspek penting untuk dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Keberagaman bidang ekonomi merupakan motor ekonomi bangsa. Antara lain agribisnis, pariwisata, healthcare, e-commerce untuk produk-produk unggulan Indonesia, dan tenaga kerja ekspor. Dalam mengembangkan 5 sektor ekonomi tersebut, kebijakan mendasar yang harus dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait di antaranya; 1. perbaikan kurikulum pada pendidikan vokasional yang selaras dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan perkembangan Revolusi Industri 4.0, 2. pemenuhan guru produktif dengan cara membuat aturan agar tenaga pengajar terampil dalam mengajar, 3. peningkatan mutu sarana dan prasarana peralatan praktik yang sesuai dengan kebutuhan DUDI, 4. menciptakan suatu online

job platform untuk mempermudah menemukan kesesuaian supply dan demand di pasar tenaga kerja, 5. pembedaan penyaringan siswa agar yang masuk ke sekolah vokasi merupakan siswa yang berkualitas, 6. kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dan DUDI melalui pemagangan, dan 7. memperkuat keterlibatan asosiasi, industri, dan masyarakat dalam pengembangan vokasi.

## 2. Pembelajaran Vokasi dari Negara Lain

Belajar pengalaman dual system pendidikan vokasi di Jerman diantaranya;

Sejarah lama Dual VET (sistem pendidikan ganda) dalam sistem pendidikan vokasi, Struktur ekonomi yang sangat berkembang menghasilkan permintaan yang tinggi akan karyawan terampil di pasar tenaga kerja, Usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat, adanya Minat, komitmen dan kemampuan perusahaan untuk melatih, Representasi yang kuat dan kompeten dari kepentingan majikan dan karyawan (organisasi kamar/serikat buruh), Penerimaan standar VET berbasis luas melalui keterlibatan yang kuat dari mitra sosial dalam VET dan budaya kerjasama yang baik, Kapasitas regulasi pemerintah yang kuat, Guru dan pelatih VET yang kompeten dan berkualitas, Sistem pendidikan umum membuat kaum muda siap untuk VET.

## 3. perspektif dan harapan dunia usaha dan dunia industri terhadap pendidikan kejuruan vokasi.

Output dari pendidikan vokasi merupakan sumber tenaga kerja terampil, yang dapat diserap DUDI. Padahal kenyataannya DUDI tidak serta merta langsung dapat menerima atau menyerap lulusan pendidikan vokasi karena secara umum tidak mempunyai bekal yang cukup dalam keahlian maupun keterampilan yang dibutuhkan oleh DUDI. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan dan strategi dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan vokasi, namun pada kenyataannya berdasarkan data dari KADIN (kamar dagang dan industri) lapangan kerja yang dapat terserap oleh lulusan pendidikan vokasi hanya 40%, sedangkan pengangguran terbuka lulusan SMK 11,2% dan Politeknik serta sejenisnya 6,0%.

Menurut berbagai sumber diantaranya KADIN, maupun APINDO (asosiasi pengusaha Indonesia) rendahnya daya serap lulusan pendidikan vokasi terhadap DUDI dikarenakan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan DUDI, perbedaan penilaian tentang standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), sinergitas lembaga pendidikan dengan DUDI. Hubungan yang bersinergi dan harmonis antara lembaga pendidikan dengan DUDI beserta pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dengan industri dan komunitas merupakan kunci dalam membangun ekosistem pendidikan vokasi yang baik.

## D. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan vokasi di Indonesia belum memenuhi harapan walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya seperti revitalisasi pendidikan vokasi, pada kenyataannya pengangguran terbuka dari jenjang pendidikan vokasi menyumbang angka pengangguran tertinggi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategi secara struktural dan sistematis oleh para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut seperti; Terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi (*Real Link and Match DUDI*); Tingkat pengangguran lulusan dari pendidikan vokasi masih tinggi; Kompetensi SDM (Dosen/Guru/Instruktur) belum sesuai kebutuhan baik secara internal dalam pendidikan vokasi maupun untuk kebutuhan industri; Kualitas lulusan dari pendidikan vokasi masih belum memadai sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah; Pengembangan bidang keahlian pada lembaga kursus dan pelatihan belum sejalan dengan kebutuhan industri serta belum merespon kebutuhan pasar.

## E. Referensi

- Badan Pusat Statistik, (2020). Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Orang), 2020-2021.
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun (2020-2024), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Laporan Panitia Kerja, (2020). Pendidikan Vokasi Komisi X, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.
- Eka Prihatin Disas, (2018). Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan, Jurnal Penelitian Indonesia.
- Afrina, Eka, dkk. (2018). Vokasi di Era Revolusi Industri: Kajian Ketenagakerjaan di Daerah. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta.

- Badan Pusat Statistik, (2021). Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2011 – 2021
- Mariana Ulfah Hoesny, Rita Darmayanti, (2021). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (Vol. 11 No. 2).  
[https://www.ruangguru.com/blog/fakta-kualitas-guru-di-indonesia-yang-perlu-anda-ketahui-pada tanggal \(20 November 2021\).](https://www.ruangguru.com/blog/fakta-kualitas-guru-di-indonesia-yang-perlu-anda-ketahui-pada-tanggal-20-november-2021)
- Irwanto, 2021. link and match pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan industri di indonesia, Jurnal Inovasi Penelitian (Vol.2 No.2 Juli 2021).  
<http://kinerja.ekon.go.id/berita/detail/program-prioritas-43-pengembangan-vokasi>
- Wolfgang Bliem, Alexander Petanovitsch, Kurt Schmid, (2014). Success factors for the Dual VET System Possibilities for Know-how-transfer. Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft.
- Bärbel Fürstenau , Matthias Pilz , and Philipp Gonon, (2014). The Dual System of Vocational Education and Training in Germany – What Can Be Learnt About Education for (Other) Professions, t: <https://www.researchgate.net/publication/280702844>.